

**FAKTOR PENGHAMBAT INOVASI SEKTOR PUBLIK
(STUDI PADA APLIKASI BEBAYA KOTA SAMARINDA)**

Gusti Naufal Rizky Perdana, Bambang Irawan

**EJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik (Studi Pada Aplikasi Bebaya Kota Samarinda)

Pengarang : Gusti Naufal Rizky Perdana

NIM : 1802015027

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 April 2022

Pembimbing



Dr. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Volume : 9	
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5698-5709	

FAKTOR PENGHAMBAT INOVASI SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA APLIKASI BEBAYA KOTA SAMARINDA)

Gusti Naufal Rizky Perdana¹, Bambang Irawan²

Abstrak

Demi menyelamatkan eksistensi pelaku UMKM ditengah perkembangan globalisasi dan pandemi covid 19, pemerintah harus melaksanakan inovasi sektor publik dalam hal mermuskan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan inovasi sektor publik tidak terlepas dari tantangan atau faktor penghambat didalamnya. Adapun penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi faktor penghambat dari inovasi ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Temuan pada penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat dalam inovasi aplikasi bebaya terkait tidak ada koordinasi dan komunikasi serta minimnya aparatur pemerintah Kota Samarinda menggunakan dalam mengembangkan inovasi aplikasi bebaya, minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat Kota Samarinda, ketidakmasimalan sosialisasi serta promosi yang dilakukan, mengalami penurunan transaksi signifikan akibat tidak konsisten menyebarkan produk inovasi, belum dapat menyentuh semua kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi, E-government, Aplikasi Bebaya

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: gustinaufalrp@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang terkena dampak pandemi COVID-19. Karena ketidakpastian lingkungan dan munculnya perubahan kebijakan, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan cepat agar dapat beradaptasi. Terlepas dari segala keterbatasan, pelaku UMKM menghadapi banyak masalah akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UMKM sekitar 37.000

pelaku UMKM dilaporkan terkena dampak pandemi COVID-19, dengan sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan masalah keuangan dan 15% melaporkan masalah distribusi barang dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku (Thaha, 2020). Menurut hasil kajian lain yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pandemi COVID-19 menyebabkan hingga 94,69% pelaku usaha mengalami penurunan penjualan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan usaha lebih dari 75%. juga terkena dampak kerentanan penutupan bisnis (Aldania & Niswah, 2021).

Salah satu daerah yang terkena dampak pandemi COVID-19 adalah Kalimantan Timur. Semua sektor terkena dampaknya, termasuk para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan daerah Kaltim itu sendiri. Jumlah UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 sebanyak 307.343 pelaku usaha yang teridentifikasi. Jumlah pelaku UMKM di Kaltim terdiri dari 297.207 pengusaha mikro, 9.440 UKM, dan 696 UKM. Yang paling umum adalah kota Samarinda dan Balikpapan (Diskominfo Kaltim, 2021).

Pelaku UMKM di Kota Samarinda paling terdampak Covid-19 di provinsi Kaltim, dengan total 158.624 pelaku usaha. Selain itu, saluran dukungan bagi pelaku UMKM di Kota Samarinda belum komprehensif. Dari total 158.624 UKM di Kota Samarinda yang terdampak Covid19, hanya 42.805 UKM yang mendapat dukungan usaha mikro produktif (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarianda, 2021).

Menyikapi tantangan pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Samarinda harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi prioritas adalah sektor UMKM yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian di masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, dan dapat membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Parassari & Anggreswari, 2021). Upaya Kota Samarinda dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Program Behambinan merupakan program bersama antar pengembang yang terlibat dalam penguatan dan peningkatan perekonomian daerah khususnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam arti memperlancar pembangunan dalam dan meningkatkan kepentingan umum, sekaligus dengan memperhatikan potensi daerah yang dilandasi pembangunan bersama semua pihak yang terlibat sesuai misinya. Pasal 8 menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat berupa aplikasi bagi seluruh UMKM di Samarinda melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

Aplikasi Behambinan merupakan program bagi semua pelaku UMKM yang berada di Kota Samarinda melalui satu program online yang difasilitasi Diskominfo dan OPD terkait lainnya. Pada awal peluncuran program behambinan salah satunya untuk mengakomodir pedagang di pasar ramadhan memungkinkan menjual secara *online* di aplikasi Behambinan yang tidak dapat berjualan secara

langsung dikarenakan persebaran pandemi covid-19 (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda, 2020). Aplikasi Behambinan dalam kepemimpinan baru Walikota Samarinda terjadi perubahan nama aplikasi. Yaitu adanya *rebranding* menjadi aplikasi Bebaya, sebagai bentuk penunjang dan mendukung RPJMD yang baru (Tribun Kaltim, 2021). Aplikasi Bebaya ini merupakan *digital marketplace* bagi warga kota Samarinda sebagai bentuk solusi atas permasalahan para pelaku UMKM menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19. Aplikasi Bebaya diluncurkan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk membantu para pelaku UMKM dalam berjualan digital di kota Samarinda selama masa pandemi covid-19. Mengingat pandemi covid-19 belum sepenuhnya berakhir, aplikasi Bebaya menjadi sangat penting bagi warga Kota Samarinda. karena hanya dari gawai masyarakat bisa memantau produk-produk yang dijual di pasar dan yang di jual oleh pelaku UMKM.

Inovasi sektor publik melalui aplikasi Bebaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang menyediakan fasilitas *digital marketplace* yang mempermudah transaksi penjualan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, setiap inovasi yang ditawarkan harus mampu mendorong perubahan dengan mengedepankan aspek-aspek inovatif masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya (Mardikanto & Soebianto, 2019).

Inovasi melalui aplikasi Bebaya harus sejalan dengan persepsi Pelaku UMKM terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran produk. Juga melibatkan warga Samarinda dan menggunakan aplikasi Bebaya untuk menggerakkan roda perekonomian di kalangan UMKM Kota Samarinda. Namun dalam pelaksanaan inovasi aplikasi Bebaya terdapat beberapa faktor penghambat sehingga menghasilkan ketidakmaksimalan.

Dari hasil observasi penulis menemukan permasalahan berkenaan dengan (1) Penggunaan aplikasi Bebaya baru digunakan oleh 4.312 warga dari jumlah keseluruhan 827.994 masyarakat Kota Samarinda. Hal ini membuktikan masih minimnya partisipasi masyarakat Kota Samarinda itu sendiri dalam membantu menggerakkan roda perekonomian terkhusus bagi kalangan pelaku UMKM. (2) Tercatat hanya 456 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penjual yang sudah terverifikasi, padahal ada 158.624 pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 di Kota Samarinda. Maka Inovasi aplikasi Bebaya belum dapat menyeluruh dirasakan oleh pelaku UMKM Kota Samarinda. (3) Keterbatasan dalam hal melakukan *branding* untuk menarik minat masyarakat dan pelaku UMKM itu sendiri, karena tidak dapat memberikan insentif potongan harga ataupun gratis ongkir dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pada inovasi aplikasi bebaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat tumbuh dan memberdayakan diri. Di tengah lingkungan yang berubah dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Pemerintah harus mampu hadir sebagai fasilitator yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat hadir sebagai bentuk pencapaian masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang inklusif. Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan bagi individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya sendiri untuk perubahan sosial (Najiyati et al., 2005).

Anthony Bebington menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tak terelakkan (Mardikanto & Soebianto, 2019). Dari sudut pandang Robert Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai sosial. Hal ini mencerminkan paradigma pembangunan baru dengan karakteristik *People Centricity* (berpusat pada rakyat), *Participatory* (partisipasi), *Empowerment* (pemberdayaan) dan *Sustainability* (berkelanjutan) (Hamid, 2018).

Dari uraian di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan peluang bagi kelompok masyarakat untuk memperoleh akses dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dengan pembatasan sosial yang menghambat mobilitas ekonomi, berdampak pada masyarakat kecil. Hal ini menjadikan pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam situasi pandemi yang berubah-ubah. Terutama dalam menjaga eksistensi perekonomian nasional.

Inovasi Sektor Publik

Kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat harus tetap mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung di masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam menghadapi ketidakstabilan lingkungan mengharuskan program pemberdayaan masyarakat diselaraskan dengan inovasi sektor publik. Dengan terus melakukan inovasi sehingga memberikan manfaat dan implementasinya lebih komprehensif.

Globalisasi menuntut pemerintah untuk berevolusi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesiapan untuk menjalankan pemerintahan yang efisien yang berfokus pada kenyamanan masyarakat menjadikan inovasi sebagai suatu keharusan. Pada hakikatnya, inovasi dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan manfaat yang dirasakan oleh penerima dan penyedia layanan (Nurhayoko et al., 2020). Pemerintah perlu berinovasi dalam banyak hal, termasuk kesejahteraan perekonomian masyarakat. Kehadiran inovasi di sektor publik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat. Konsep inovasi dalam pemberdayaan masyarakat perlu diimplementasikan sebagai jawaban atas permasalahan masyarakat. Inovasi di sektor publik dapat dipahami sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru dengan mempengaruhi nilai ekonomi atau sosial dalam rangka meningkatkan kualitas individu, organisasi dan masyarakat (Putera et al., 2014). Selain itu, Windrum berpendapat bahwa inovasi sektor publik berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyatnya sendiri (Nurhayoko et al., 2020).

Dapat dipahami bahwa inovasi sektor publik dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Inovasi di sektor publik berhasil ketika masyarakat dapat mencapai dan menyadari manfaat inovasi. Sektor publik melayani kepentingan publik dan berinovasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Lingkungan yang berkembang semakin memperumit masalah dan kebutuhan masyarakat, dan penyelenggara organisasi publik bersifat dinamis dan dipaksa untuk terus berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat.

E-Government

Proses inovasi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat harus berpedoman pada konsep *e-government*. Program layanan berbasis aplikasi perlu memfasilitasinya bagi masyarakat penerima program. *E-government* dapat memberikan efisiensi kepada pelaksana dan penerima program, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Konsep *e-government* juga dapat diterapkan pada implementasi pemberdayaan masyarakat yang dicapai melalui inovasi. Selain memudahkan pemberi pemberdayaan, pengenalan teknologi membuat program pemberdayaan lebih mudah diakses masyarakat dan lebih komprehensif. Menerapkan mosi kepada pemerintah merupakan ukuran prioritas, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. *E-government* dalam bentuk aplikasi elektronik dapat membangkitkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi untuk tujuan pemberdayaan masyarakat (Indrayani, 2020). Selain itu, Heeks mendefinisikan *e-government* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi. (Taufiq et al., 2019). Definisi khas dari *e-government* memiliki beberapa tujuan, seperti merestrukturisasi hubungan pemerintah dan masyarakat, meningkatkan penyediaan layanan publik, memberdayakan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menghubungkan ke masyarakat terutama desa (Indrayani, 2020).

Dari penerangan diatas bisa dipahami bahwa *e-government* adalah upaya pemerintah buat menjalankan ke pemerintahannya memakai teknologi menggunakan agar bisa menciptakan aplikasi efektif dan bisa mempermudah pemberi serta penerima layanan.

UMKM Digital

Menyusul implementasi inovasi pemberdayaan elektronik untuk meningkatkan perekonomian nasional, masyarakat perlu dapat memanfaatkan media elektronik. Usaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya harus mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi sebagai salah satu permasalahan pemberdayaan ekonomi.

Ruditjo memahami bahwa UMKM merupakan usaha kecil yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak perusahaan (Abdurohim, 2021). UMKM adalah perusahaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah yang belum dikonversi secara komersial. UMKM membantu mengelola sumber daya alam di setiap daerah (Handini et al., 2019). Agar dapat bertahan, pelaku UMKM harus mampu bertransformasi menjadi jiwa wirausaha digital. Bisnis digital adalah bisnis yang menggunakan teknologi digital canggih untuk mengoperasikan dirinya sendiri baik dalam proses maupun pemasaran produk dan layanan. Segala jenis kegiatan jual beli *online*, baik yang menggunakan *website* maupun aplikasi, termasuk dalam *Digital Entrepreneurship* (Arianto, 2020).

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa UMKM Digital merupakan upaya para pelaku UMKM untuk mengalihkan komunikasi dan interaksi bisnis dari penggunaan tradisional ke penggunaan elektronik. Digitalisasi mencakup segala hal mulai dari pemasaran dan pembayaran hingga operasi bisnis yang lebih efisien. UMKM digital telah beralih ke model distribusi elektronik untuk bertahan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui kebutuhan dan model pasar solusi untuk masalah pelaku UMKM.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemberian batasan pada penelitian terhadap teori dan konsep yang sudah dipaparkan dengan tujuan untuk membatasi penulis dalam mengemukakan teori dan konsep yang telah disajikan. Adapun definisi konseptual pada penelitian kali ini sebagai berikut.

Penciptaan produk layanan aplikasi baru bernama aplikasi bebaya dengan melihat faktor-faktor penghambat pelaksanaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dapat memberdayakan dan mendapatkan aksesibilitas peningkatan ekonomi terkhusus bagi pelaku UMKM yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dijelaskan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi post-positif atau filsafat sekuler, metode penelitian kualitatif digunakan dalam hal objek alamiah, keberadaan peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif berfokus pentingnya generalisasi (Sugiyono, 2020). Best menyatakan bahwa penelitian deskriptif

adalah metode penelitian yang menggambarkan objek dan subjek penelitian berdasarkan apa yang terjadi di lapangan (Samsu, 2017).

Dalam penelitian ini memiliki sumber data primer dan sekunder. Pemilihan sumber data primer meliputi *key informan* dan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dapat dipahami sebagai teknik pengambilan sampel data dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, orang yang akan dipilih dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin seorang pemimpin, yang memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui pengumpulan data (*Data Collection*), konsensasi data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*Concluding Drawing/Verification*) (Sugiyono, 2020).

Hasil Penelitian

Tidak ada Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Belum adanya komunikasi dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk bersama-sama dalam mengembangkan aplikasi bebaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, sebagai pengembang aplikasi peran aparaturnya Pemerintah Kota Samarinda untuk menggunakan inovasi aplikasi bebaya masih belum maksimal. Hal ini selaras dengan teori level inovasi Mulgan dan Albury pada level transformatif atau sistematis yang dimana pada inovasi ini menyebabkan perubahan organisasi yang drastis dengan mentransformasikan semua bidang dan memperkuat hubungan organisasi. Jenis inovasi ini membutuhkan waktu lebih lama dan membutuhkan perubahan mendasar dalam struktur organisasi, budaya, dan sosial (Muluk, 2008).

Maka dari itu seiring hadirnya inovasi sektor publik tidak hanya sebatas terjadi kebaruan, namun diikuti dengan kemampuan antar organisasi untuk dapat melakukan penguatan dalam hal bekerjasama. Melihat hal ini, dari faktor penghambat inovasi aplikasi bebaya. Pemerintah Kota Samarinda belum dapat sepenuhnya mendorong kerjasama di internal OPD serta belum dapat mengakomodir aparaturnya Pemerintah Kota Samarinda untuk memanfaatkan aplikasi bebaya.

Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Belum Maksimal

Pengetahuan dan partisipasi masyarakat Kota Samarinda dalam menggunakan aplikasi bebaya masih belum maksimal. Hal ini membuat pasar

atau pembeli pada aplikasi bebaya belum luas dan masih jauh tertinggal dengan aplikasi *marketplace* lain.

Pada tahap penyebarluasan inovasi terdapat fase difusi dan adopsi yang dimana pada titik ini, program atau layanan inovatif sudah ada di masyarakat. Masyarakat dapat belajar tentang program atau layanan dan mulai menentukan pilihan mereka untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu inovasi (Suwarno, 2008). Masyarakat dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi bebaya. Dalam hal ini kedudukan aplikasi bebaya sebagai pasar digital masyarakat Kota Samarinda hadir menjadi salah satu solusi bersama aplikasi yang telah ada. Namun dikarenakan hal ini pula, inovasi aplikasi bebaya seolah tidak menjadi pilihan pertama karena telah banyak tempat transaksi jual beli digital yang telah hadir. Selain itu kehadiran tempat jual beli konvensional membuat beberapa masyarakat memilih untuk tetap nyaman berbelanja secara langsung.

Dengan telah ada kehadiran aplikasi lain yang serupa dan aplikasi bebaya tidak dapat memberikan tawaran menarik membuat masyarakat memilih menggunakan aplikasi yang telah ada. Selain itu, transaksi jual beli secara konvensional yang masih digandrungi membuat inovasi ini tidak menjadi pilihan utama di masyarakat.

Tidak Maksimalnya Sosialisasi dan Promosi

Sosialisasi dan promosi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda terkait inovasi aplikasi bebaya dirasa masih belum maksimal, sehingga inovasi ini belum tersampaikan di semua elemen masyarakat. Pada proses pengembangan inovasi terdapat komersialisasi yang dianggap sebagai produksi, pengemasan, dan distribusi suatu inovasi. Namun, dalam kasus sektor publik, komersialisasi adalah proses penyebaran produk tanpa komersialisasi apapun (Suwarno, 2008). Melihat hal ini pemerintah Kota Samarinda harus dapat melakukan penyebaran inovasi tanpa adanya mengambil keuntungan. Namun tetap melakukan cara-cara inovatif dan tidak monoton dengan cara konservatif.

Dalam inovasi ini pemerintah Kota Samarinda telah melakukan sosialisasi dan promosi melalui baliho, media sosial, dan berita tetapi hasil yang didapatkan. Bahwa inovasi aplikasi bebaya masih memiliki kendala terhadap sosialisasi dan promosi. Terbatasnya gerak Diskominfo Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi yang inovatif karena hanya bertanggungjawab dalam hal pengembangan inovasi. Butuh strategi komunikasi yang dapat membuat sosialisasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara inklusif.

Tidak Konsisten Mengembangkan dan Memasarkan Produk

Kehadiran aplikasi bebaya mengalami penurunan transaksi hingga saat ini karena tidak konsistennya dalam mengembangkan dan memasarkan produk inovasi. Padahal pada awal kemunculannya aplikasi bebaya sempat mengalami kenaikan transaksi dikarenakan momentum bulan puasa yang pada saat itu ditiadakannya pasar ramadhan di Kota Samarinda. Selaras dengan pendapat ahli

yang menyatakan komersialisasi dapat dianggap sebagai produksi, pengemasan, dan distribusi suatu inovasi. Namun, dalam kasus sektor publik, komersialisasi adalah proses penyebaran produk tanpa komersialisasi apapun (Suwarno, 2008).

Pihak Diskominfo Kota Samarinda telah melakukan komersialisasi dengan tidak memungut biaya apapun, namun tidak dapat merespon momentum lain yang ada di masyarakat seperti yang terjadi pada awal kemunculan aplikasi bebaya. Sehingga aplikasi bebaya tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Samarinda.

Belum Dapat Diakses Seluruh Kalangan Masyarakat

Aplikasi bebaya belum dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan aplikasi bebaya hanya tersedia di gawai berbasis *android*. Sehingga masyarakat yang menggunakan gawai dengan sistem operasi berbeda akan sulit bahkan tidak dapat mengakses aplikasi bebaya.

Pelaksanaan *e-government* membutuhkan akses yang meliputi meliputi jaringan internet, jaringan komunikasi, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal layanan (Akadun, 2009). Dari pendapat tersebut, perkembangan inovasi aplikasi bebaya masih belum maksimal pada segi akses yang dimana kemungkinan aplikasi bebaya digunakan oleh masyarakat Kota Samarinda belum inklusif.

Kesimpulan

Inovasi aplikasi bebaya bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Samarinda terdapat beberapa faktor penghambat di dalamnya. Pertama, terkait komunikasi dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tidak terjalin dalam mengembangkan aplikasi bebaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta aparatur pemerintah Kota Samarinda belum bisa memanfaatkan aplikasi bebaya secara masif. Kedua, pengetahuan dan partisipasi masyarakat Kota Samarinda yang belum sepenuhnya mengetahui keberadaan aplikasi bebaya ini. Ketiga mengenai masih kurang maksimalnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda sehingga aplikasi ini belum keseluruhan masyarakat Kota Samarinda mengetahui inovasi aplikasi bebaya. Keempat, berkenaan dengan Pemerintah Kota Samarinda tidak dapat memanfaatkan momentum yang terjadi di masyarakat untuk menyebarluaskan inovasi aplikasi bebaya. Terakhir, akses aplikasi bebaya masih belum maksimal yang hanya dapat diakses pada gawai berbasis *android*.

Saran

Secara umum inovasi aplikasi bebaya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah memenuhi karakteristik inovasi. Dari hasil penelitian dan kesimpulan

penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak dalam pelaksanaan inovasi aplikasi bebaya, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Samarinda harus dapat membangun forum komunikasi antar beberapa OPD terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta melibatkan Perusahaan Umum Daerah Kota Samarinda untuk melakukan kersajama dalam mengembangkan aplikasi bebaya dan merumuskan dokumen teknis untuk pembagian tugas antar stakeholder terkait.
2. Sebagai pelaksana pemerintahan, aparatur pemerintah sebaiknya dapat menjadi pengguna inovasi aplikasi bebaya sehingga dapat membantu perkembangan aplikasi bebaya. Maka dari itu dibutuhkan program tersendiri bagi aparatur Pemerintah Kota Samarinda untuk menggunakan aplikasi bebaya secara masif. Dengan adanya program mewajibkan membeli pada aplikasi bebaya ketika adanya agenda-agenda rapat maupun pada istirahat kerja melakukan makan minum dari kantor yang pembelian kebutuhan konsumsinya di aplikasi bebaya.
3. Kurang maksimalnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan Diskominfo Kota Samarinda terkait aplikasi bebaya. Maka pemerintah harus dapat melakukan promosi dengan memanfaatkan momentum tertentu yang sedang terjadi di masyarakat, melakukan sosialisasi kesemua kalangan masyarakat yang menjangkau keseluruhan kelurahan di Kota Samarinda dan melakukan sosialisasi terhadap generasi muda Kota Samarinda seperti ke kampus dan sekolah.
4. Perlu ditambahkan fitur lain yang dapat membedakan aplikasi bebaya dengan aplikasi lainnya. Dengan menjadikan aplikasi bebaya sebagai aplikasi layanan satu pintu. Adapun beberapa beberapa fitur yang dapat ditambahkan terkait fitur edukasi bisnis bagi pelaku UMKM dan masyarakat, fitur perizinan usaha digital terintegrasi, dan pembantuan permohonan modal usaha melalui aplikasi bebaya. Selain itu menawarkan fitur yang komperhensif bagi pembeli dengan menambahkan yang tidak hanya berfokus pada penjualan produk namun hingga ke bidang jasa seperti pariwisata.
5. Aplikasi bebaya masih belum menyentuh kesemua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aplikasi bebaya hanya bisa diakses melalui gawai berbasis *android*. Maka dari itu pemerintah Kota Samarinda harus melakukan pengembangan aplikasi ke gawai yang menggunakan sistem operasi lain seperti *ios* dan *harmonyOS*. Pengembangan ini akan berdampak bagi kesempatan masyarakat Kota Samarinda yang tidak menggunakan gawai berbasis *android* untuk menggunakan aplikasi bebaya sebagai tempat transaksi secara digital.
6. Demi menunjang promosi dan pengembangan aplikasi bebaya, Pemerintah Kota Samarinda menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk operasional pengembangan aplikasi dan promosi. Agar inovasi aplikasi bebaya tidak hanya menjadi program ceremonial yang akhirnya tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dapat terus berkembang

secara berkelanjutan yang menjadi pilar masyarakat Kota Samarinda dalam bidang perekonomian.

Daftar Pustaka

- Abdurohim, D. (2021). *Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Akadun. (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Aldania, A., & Niswah, F. (2021). Strategi Kompetitif Melalui Program Pahlawan Ekonomi Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9 (2), 137–148.
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6 (2), 233–247.
- Diskominfo Kaltim. (2021). *UMKM Yang Terdampak Covid Mendapat Bantuan*. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/umkm-yang-terdampak-covid-mendapat-bantuan>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemeberdayaan Masyarakat*. Makasaar: De La Macca.
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Indrayani, E. (2020). *E-government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Solok: LPP Balai Insan Cendekia.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Nurhayoko, G. E., Pramudita, A., & Nugroho, R. B. B. (2020). *Inovasi Birokrasi (Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Parassari, N. S. M., & Anggreswari, N. P. Y. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM “Lovely Bali” Dalam Mengolah Hasil Limbah Industri Menjadi Produk Upcycle. *Open Journal Systems*, 15 (12), 5841–5852.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarianda. (2021). *42.805 UMKM Terdampak Covid-19 Diguyur Bantuan Tunai Rp51 Miliar*. <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kabar-pemerintahan/42805-umkm-terdampak-covid-19-diguyur-bantuan-tunai-rp51-miliar>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda. (2020).

Walikota Samarinda Launching Program Behambinan dan Pokja Covid-19 Berbasis Kampung KB Lewat Teleconference.

<https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kabar-pemerintahan/walikota-samarinda-launching-program-behambinan-dan-pokja-covid-19-berbasis-kampung-kb-lewat-teleconference>

Peraturan Walikota Samarinda nomor 17 Tahun 2020 tentang Program Behambinan.

Putera, P. B., Arifin, M., Zulhamdani, M., Mulatsih, S., Indraprahasta, G. S., Asmara, A. Y., & Oktaviyanti, D. (2014). *Kebijakan Inovasi di Daerah dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002: Konsep dan Implementasinya di Jawa timur dan Jawa Tengah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualititaif (Untuk Penelitian Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Y. (2008). *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika*, 6 (1), 145–152.

Thaha, A. F. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2 (1), 147–153.

Tribun Kaltim. (2021). *Aplikasi Behambinan Wadah UMKM Samarinda Kala Pandemi Covid-19, Berganti Nama jadi Bebaya Mart*.

<https://kaltim.tribunnews.com/2021/05/20/aplikasi-behambinan-wadah-umkm-samarinda-kala-pandemi-covid-19-berganti-nama-jadi-bebaya-mart>